



RENCANA AKSI 2020

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Februari 2020



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK

FIGHT AGAINST
X-CRIME

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pencegahan dan pengamanan Hutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2020 kedepan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam melaksanakan pengamanan Kawasan Hutan sebagai tugas yang di embankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah TA 2020 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan di dalam peningkatan kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2020

Direktur



Ir. Sustyo Iriyono, M.Si

NIP. 19620621 199002 1 001

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020 adalah dokumen rencana aksi tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tahun 2020 yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Dit. PPH terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia. Bagi Dit. PPH yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2020, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2020 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PPH. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Pencegahan dan Pengamanan Hutan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

- Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.82 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 3 Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020



BAB II RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020, telah disampaikan bahwa kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun kegiatan lingkup Eselon II di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	3.000.000 Ha
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	110 Operasi
	Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	210 Orang

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dit. PPH TA 2020, adalah sebagai berikut;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan dengan target Luas hutan yang diamankan dari Gangguan dan Ancaman bidang kehutanan pada Kawasan Hutan di 34 Provinsi (3.000.000 Ha)	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.276.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	18 Operasi
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Layanan

Jumlah Anggaran Kegiatan Dit. PPH :

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Kegiatan Pencegahan dan pengamanan Hutan | : Rp. 39.927.263.000,- |
| 2. | Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas lainnya | : <u>Rp. 2.855.480.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp. 42.922.743.000,- |



PROGNOSIS CAPAIAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020

NO	Keterangan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2020	Satuan
	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	400.000	600.000	1.120.000	880.000	3.000.000	Hektar

PROGNOSIS CAPAIAN PROGRAM DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020

1	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan						
		Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan (Target 1.276.000 Ha)	150.500	622.500	431.500	71.500	1.276.000	Hektar
		Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	7	8	10	5	30	Lokasi
		Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	50.000	120.000	130.000	46.000	346.000	Hektar
		Operasi Penyelamatan SDA	100.000	500.000	300.000	25.000	925.000	Hektar
		Kawasan Hutan di DAS Citarum yang diamankan						
		Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum	500	2.500	1.500	500	5.000	Hektar
		Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum	1	1	1	1	4	Kegiatan



NO	Keterangan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2020	Satuan
Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal								
		Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	8	10	10	7	35	Dokumen
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar	7	4	5	3	18	Operasi
		Operasi Pengamanan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar	2	2	2	2	8	Operasi
Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan								
		Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK		1		1	2	Dokumen
		Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	1	1	1	1	4	Kegiatan
		Peningkatan Kapasitas Polhut			75		75	Orang
		Penguatan Sistem Intelijen			1		1	Laporan
		Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan				1	1	Kegiatan



BAB III PENUTUP

Tercapainya sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh kontribusi penuh dari unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana pencegahan dan pengamanan hutan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Penyusunan rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan di bidang kehutanan dapat berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.





RENCANA AKSI 2020

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



DITJENGAKKUM.KLHK



@GAKKUMKLHK



GAKKUM KLHK



gakkum.klhk

FIGHT AGAINST
X-CRIME

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pencegahan dan pengamanan Hutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan dan prognosis per Triwulan di Tahun 2020 kedepan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam melaksanakan pengamanan Kawasan Hutan sebagai tugas yang di embankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah TA 2020 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Aksi ini diharapkan adanya optimalisasi peran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan di dalam peningkatan kinerja seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun tahun selanjutnya.

Direktur

Sustyo Iriyono



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2020 adalah dokumen rencana aksi tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan tahun 2020 yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Dit. PPH terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia. Bagi Dit. PPH yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2020, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja TA 2020 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PPH. Tujuan dari Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan lingkup Pencegahan dan Pengamanan Hutan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

- Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.82 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
- Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 3 Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020



BAB II RENCANA AKSI

Sesuai dengan perjanjian kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020, telah disampaikan bahwa kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tersedianya instrumen dan regulasi untuk mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun kegiatan lingkup Eselon II di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	3.000.000 Ha
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	110 Operasi
	Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	210 Orang

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dit. PPH TA 2020, adalah sebagai berikut;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan dengan target Luas hutan yang diamankan dari Gangguan dan Ancaman bidang kehutanan pada Kawasan Hutan di 34 Provinsi (3.000.000 Ha)	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.276.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	18 Operasi
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Layanan

Jumlah Anggaran Kegiatan Dit. PPH :

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Kegiatan Pencegahan dan pengamanan Hutan | : Rp. 39.927.263.000,- |
| 2. | Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas lainnya | : <u>Rp. 2.855.480.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp. 42.922.743.000,- |



PROGNOSIS CAPAIAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020

NO	Keterangan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2020	Satuan
	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	400.000	600.000	1.120.000	880.000	3.000.000	Hektar

PROGNOSIS CAPAIAN PROGRAM DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020

1	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan						
		Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan (Target 1.276.000 Ha)	150.500	622.500	431.500	71.500	1.276.000	Hektar
		Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	7	8	10	5	30	Lokasi
		Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	50.000	120.000	130.000	46.000	346.000	Hektar
		Operasi Penyelamatan SDA	100.000	500.000	300.000	25.000	925.000	Hektar
		Kawasan Hutan di DAS Citarum yang diamankan						
		Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum	500	2.500	1.500	500	5.000	Hektar
		Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum	1	1	1	1	4	Kegiatan



NO	Keterangan
----	------------

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target 2020	Satuan
Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal						
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	8	10	10	7	35	Dokumen
Jumlah Operasi Pembalakan Liar	7	4	5	3	18	Operasi
Operasi Pengamanan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar	2	2	2	2	8	Operasi
Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan						
Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK		1		1	2	Dokumen
Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	1	1	1	1	4	Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Polhut			75		75	Orang
Penguatan Sistem Intelijen			1		1	Laporan
Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan				1	1	Kegiatan



BAB III PENUTUP

Tercapainya sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh kontribusi penuh dari unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana pencegahan dan pengamanan hutan serta semua pemangku kepentingan dalam upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan akibat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Penyusunan rencana aksi ini dapat mendorong penyelenggaraan program luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan di bidang kehutanan dapat berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

